



ꦒꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦤꦶꦭꦶ
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
ꦥꦺꦛꦱꦺꦱꦺꦩꦺꦱꦠꦺꦧꦺꦫꦺꦤꦤꦺꦴ
BALI ERA BARU

RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023, dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Awal Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 memuat rancangan program dan kegiatan serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif untuk penyusunan awal RKPD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratik dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen perencanaan untuk dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang didukung oleh mitra kerjanya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra serta sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEPALA BADAN,


I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH INDUK 2020.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Kebijakan Renja 2023	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	41
3.1 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah T.A 2023.....	41
3.2 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah T.A 2023	44
3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	55
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP	73
5.1 Catatan Penting	73
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	74
5.3 Tindak Lanjut	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Riset dan Inovasi Daerah.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali s/d Tahun 2021.....	19
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai Tahun 2021.....	30
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021.....	31
Tabel 2.5	Identasi Kebutuhan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	37
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Infografis Struktur Anggaran BaRI Tahun Anggaran 2021.....	8
Gambar 2.2	Rancangan Struktur Program Anggaran BaRI Tahun 2023.....	36
Gambar 3.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1.....	46
Gambar 3.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2.....	47
Gambar 3.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3.....	49
Gambar 3.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4.....	50
Gambar 3.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5.....	51
Gambar 3.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Pembangunan Infrastruktur.....	53
Gambar 3.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	54
Gambar 3.8	Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BaRI Provinsi Bali.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa fungsi dari perencanaan adalah memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi. Karenanya, sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah,

Tahapan Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Adapun Rancangan Renja Perangkat Daerah akan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, dan disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Aawal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 memuat program/kegiatan perencanaan terkait urusan

Pemerintahan Daerah dibidang urusan Penelitian dan Pengembangan, yang berisikan tentang informasi rancangan rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan rancangan pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

1.3 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan penganggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- 1) Penjabaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 2) Menyusun rancangan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 beserta pagu inidkatif pendanaannya.
- 3) Sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 berdasarkan hasil saran/masukan para *stakeholder* terkait Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan awal Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Desa Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen, yang memuat :

- a) Pendahuluan;
- b) Hasil Evaluasi Renja Tahun 2021;
- c) Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023;
- e) Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan, yang tentunya senantiasa memperhatikan paradigma perencanaan pembangunan yang tentunya tidak akan berjalan statis, namun dinamis seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaannya.

A. Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021;

Rencana Kerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.160.505.471,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) pada rencana pos belanja langsung APBD Induk T.A 2021. Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta Meningkatnya Pelayanan Sektor Publik yang didukung 2 (empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut:

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2021



Gambar 2,1
Infografis Struktur Anggaran BaRI Tahun Anggaran 2021

Namun demikian, telah dilaksanakan *Refocussing* dan Rasionalisasi anggaran kegiatan dalam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan upaya untuk dapat tetap mencapai target secara optimal telah dilaksanakan:

1. melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan rutin/operasional yang tidak *urgent*;
2. berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait kajian-kajian yang dapat difasilitasi sesuai tema riset yang telah diagendakan;
3. melanjutkan kegiatan yang telah berkontrak dan berjalan pada T.A 2022

Rasionalisasi Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2021 mencapai Rp.4.939.745.616,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga terjadi perubahan belanja dalam RKPD – Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 21.220.759.855,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah).

A.1 Program Urusan Daerah

Urusan Penunjang Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.220.759.855,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp. 20.602.061.855,00
- a. Belanja Pegawai : Rp. 9.194.317.264,00
- b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 11.407.743.791,00
- 2. Belanja Modal : Rp. 618.698.800,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Sasaran Prioritas Daerah, yakni Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Riset dan Inovasi Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 5. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan 4. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
		3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2021

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.750.696.555,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai 80, realisasi capaian kinerja 80 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.834.498.807,00 (92,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 17 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 29.058.250,00. Realisasi kinerja sebesar 17 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.632.450,00 (77,89%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 22.883.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 20.035.000,00 (87,55%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 5 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 6.174.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.597.500,00 (42,07%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 9.198.909.064,00. Realisasi kinerja sebesar 4 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.476.564.188,00 (92,15%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 42 dokumen dan anggaran sebesar Rp 9.191..257.264, realisasi anggaran sebesar Rp 8.469.466138,00 (92,15%) dan realisasi kinerja 42 dokumen.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 600 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 5.993.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.582.150,00 (93,14%) dan realisasi kinerja 600 dokumen.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp. 1.385.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.250,00 (91,63%) dan realisasi kinerja 4 laporan.
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 273.600,00, realisasi anggaran Rp. 246.650,00 (90,15) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 6 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 331.275.525,00. Realisasi kinerja sebesar 6 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 264.357.925,00 (79,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 12 jenis dan anggaran sebesar Rp. 24.041.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 23.285.400,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 12 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 33 jenis dan anggaran sebesar Rp. 44.731.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.884.050,00 (91,40%) dan realisasi kinerja 33 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp. 135.575.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 106.342.000,00 (78,44%) dan realisasi kinerja 10 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp. 10.000.00,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.999.900,00 (100 %) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 4 jenis dan dengan anggaran sebesar Rp. 14.508.625,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 14.508.625,00 (100%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 102.419.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.337.950,00 (67,70%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 327.764.000,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 280.059.200,00 (85,45%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 (95%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp. 287.764.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 242.059.200,00 (84,12%) dan realisasi kinerja 10 jenis.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp. 511.986.736,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.442.724,00 (91,69%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 2.250.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 205.133.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.611.354,00 (79,76%) dan realisasi kinerja 3 Jenis.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 26 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 304.603.036,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 303.581.370,00. (99,66%) dan realisasi kinerja 26 Jenis.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dengan anggaran sebesar Rp. 2.351.702.980,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.321.442.320,00 (98,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 10 unit dengan anggaran sebesar Rp. 793.117.632,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 769.304.448,00 (97%) dan realisasi kinerja 10 unit.
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 13 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 1.558.585.348,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.552.137.872,00 (99,59%) dan realisasi kinerja 13 Jenis.

Adapun terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa di laksanakan. Sehingga akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.
- b) TAPERA belum dilaksanakan kegiatannya karena belum ada instruksi, sehingga akan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait instruksi mengenai TAPERA

II. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.470.063.300,00 bertujuan untuk pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja Program adalah persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan sebesar 75 persen. Realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.852.478.373,00 (92,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target kinerja 14 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 8.076.457.300. Realisasi kinerja sebesar 14 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.471.920.463 (92,51). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 6.842.201.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.319.013,00 (96,46%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan target jumlah Kajian/Penelitian, 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp. 266.959.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 264.960.650,00 (99,25%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa dengan target kinerja Analisa Data Sensus sebesar 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp. 722.296.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 492.520.050,00 (68,19%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan target Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 1 dokumen, *Innovation Government Awards* (IGA) 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 135.088.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.880.100,00 (74,68%) dan realisasi kinerja IDSD 1 dokumen, IGA 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan target 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp109.911.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.240.650,00 (12,05%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase Pencapaian Hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Kajian/Penelitian dan anggaran sebesar Rp. 347.436.600,00. Realisasi kinerja sebesar 11 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 336.183.010,00 (96,76%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan target 5 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 35.981.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 33.338.200,00 (92,65%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dengan target 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 216.025.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 209.528.660,00 (96,99%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan target 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 83.274.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 81.726.450,00 (98,14%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan dengan target 1 dokumen/laporan dan anggaran sebesar Rp. 12.155.800,00, realisasi anggaran Rp. 11.589.700,00 (95,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen/laporan

c) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk untuk persentase pencapaian hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah fasilitas permohonan HKI dan anggaran sebesar Rp. 46.169.400,00. Realisasi kinerja sebesar 80 pemohon dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.374.990,00 (96,11%).

Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan target 75 Pemohon dan anggaran sebesar Rp. 46.169.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 44.374.990,00 (96,11%) dan realisasi kinerja 80 pemohon

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali s/d Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN (BERDASARKAN PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021		Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2022	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2023	Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023	Lokasi		
		Program	Indikator Kinerja							Capaian Kinerja	
											Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan OPD provinsi bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,402,431,380	Dps		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Jumlah dok perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	17 dok	17 dok	51 dok	17dok	17 dok	125,831,300.00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	12 dok	12 dok	36 dok	12 dok	12 dok	65,192,900			

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali yang tersusun tepat waktu	5 dok	5 dok	15 dok	5 dok	5 dok	60,638,400	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan	Jumlah dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan	643 dok, 4 lap	629 dok, 5 lap	1900 dok, 15 lap	628 dokum, 6 lap	629 dok, 5 lap	11,595,896,824	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	42 dok	28 dok	84 dok	14 dok	28 dok	11,562,362,474	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi	600 dok	600 dok	600 dok	600 dok	600 dok	15,573,850	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		jumlah laporan akuntansi keuangan	4 lap	5 lap	15 lap	6 lap	5 lap	10,628,400	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dok	1 dok	3 dok	1 dok	1 dok	7,332,100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	63 jenis, 100 %	63 jenis, 100%	70 jenis, 100%	70 jenis, 100%	63 jenis, 100%	690,572,900	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik penerangan/ bangunan kantor	12 jenis	10 jenis	36 Jenis	14 Jenis	10 jenis	22,524,000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 jenis	28 jenis	99 Jenis	38 Jenis	28 jenis	54,752,900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pengisian tabung gas lpg	10 jenis	9 jenis	30 Jenis	11 Jenis	9 jenis	157,500,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	12 jenis	12 Jenis	-	12 jenis	25,180,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	9 Jenis	1 jenis	4 jenis	15,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	415,616,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	11 jenis	7 Jenis	39 Jenis	21Jenis	8 Jenis	952,920,000	
Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan mebel	1 jenis	-	3 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	233,800,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10 jenis	7 jenis	18 Jenis	1 Jenis	7 jenis	719,120,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang disediakan	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	30 jenis	38 Jenis	90 Jenis	22 Jenis	38 Jenis	553,496,036	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1 jenis	1 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	3,480,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 Jenis	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	226,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	26 jenis	34 jenis	78 Jenis	18 Jenis	34 jenis	324,016,036	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit, 13 jenis	10 Unit, 13 jenis	30 Unit, 36 Jenis	10 Unit, 10 Jenis	10 Unit, 13 jenis	3,483,714,320	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	30 Unit	10 unit	10 Unit	837,240,835	

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	13 jenis	13 jenis	36 Jenis	10 jenis	13 jenis	2,646,473,485	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,470,934,620	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	14 dok	14 dok	21 dok, 100%	100%	7 dok, 100%	9,750,000,000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan. Jumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah	2 dok	5 dok	3 dok, 100%	100%	5 dok	7,500,000,000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah kajian/penelitian	1 dok	-	3 dok, 100%	2 dok, 100%	1 dok, 100%	3000,000,	

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Analisa data sensus	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	850,000,000	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government Awards (IGA), IPKD, Penerbitan Buku dan E-Jurnal Bali Membangun Bali	6 dok	5 dok	9 dok	0	5 dok		650,000,000	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Dokumen evaluasi	4 dok	3 dok	6 dok, 100%	100%	3 dok		450,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembnagunan	Jumlah dokumen kajian/ penelitian	11 do	8 dok	45 dok	26 dok	16 dok		2,400,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Hasil Kajian/ Penelitian Bidang ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	5 dok	5 dok	15 dok	5 dok	5 dok		450,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara		Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 dok	-	12 dok	8 dok	-			

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Kajian hasil koordinasi	1 dok	-	3 dok	2 dok	1 dok	325,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Perkebunan dan Pangan.	1 dok	2 dok	9 dok	6 dok	2 dok	350,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Kajian/ Penelitian Pekerjaan Umum	-	-	3 dok	3 dok	-		
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		Jumlah dokumen kajian koperasi, usaha kecil dan menengah	-	-	2 dok	2 dok	1 dok	250,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Kajian/ Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1 dok	3 dok	2 dok	1 dok	325,000,000	
Penelitian dan pengembangan bidang Lingkungan Hidup		Jumlah kajian/ penelitian Lingkungan Hidup					1 dok	700,000,000	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian/ penelitian		-	6 dok	6 dok	2 dok	925,000,000	

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan . Pelaksanaan FGD Bidang Pariwisata. Persentase kajian/ penelitian bidang sosial dan kependudukan yang direkomendasikan	-	-	3 dok	3 dok	1 dok	350,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 dok	225,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Kesehatan . Pelaksanaan	-	-	3 dok	3 dok	1 dok	350,000,000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan	Fasilitasi Permohonan HKI, Inventarisasi data permohonan HKI di 9 Kab/ Kota	75 KI (100%)	1,395,934,620					
Uji Coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPTEKS	-	1 dok,	3 dok	2 doK	1 dok,	327,632,480	

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - hasil kelitbanagn		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hasil Kelitbangan	-	2 kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	2 kegiatan	360,302,140	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	75 KI	75 KI	75KI	75 KI	75 KI	458,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali						1 dok	250,000,000	
TOTAL PAGU INDIKATIF 2023								31,873,366,000.00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2019 Nomor 7), Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tahun 2020. Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengampu misi nomor 22, yakni mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara *sakala* dan *niskala* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga diharapkan capaian dari masing-masing kegiatan nantinya dapat memberikan kontribusi penting atas target yang telah ditetapkan, sesuai RPJMD 2018-2023

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

RJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 disusun dengan mempertimbangkan kondisi Provinsi Bali dalam keadaan normal. Namun dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020

hingga saat ini yang berdampak pada lesunya perekonomian Bali, dibutuhkan perubahan target capaian ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Bali yang masih dalam proses pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat dampak Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan. Dalam penyelenggaraan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, namun demikian, adanya pandemic COVID-19 yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah menuntut adanya refocusing dan realokasi anggaran perangkat daerah dalam upaya penanganan pandemi tersebut. Rasionalisasi Anggaran BaRI tahun 2021 mencapai Rp. 4.939.745.616,00, sehingga terjadi perubahan belanja dalam RKPD – Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 21.220.759.855,00 Berkaitan dengan hal tersebut, dengan upaya untuk dapat tetap mencapai target/optimalisasi target telah dilaksanakan:

- 1) melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan rutin/operasional yang tidak *urgent*;
- 2) berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait kajian-kajian yang dapat difasilitasi sesuai tema riset yang telah diagendakan;
- 3) melanjutkan kegiatan yang telah berkontrak dan berjalan pada T.A 2022

Upaya – upaya tersebut dilakukan agar Pencapaian Kinerja Pelayanan yang telah ditetapkan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tetap dapat tercapai secara maksimal.

Tabel 2.3

Kinerja Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai Tahun 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	13,6 6/44	18,18 6/33
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	77,8% 7/9	66,6% 6/8	77,8% 7/9

Tujuan strategis yang hendak dicapai adalah terwujudnya hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran IKU tahun 2021 yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;
2. Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Target Kinerja	Capaian 2021	% Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;	100 %	100%	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	100% (75 KI)	80 KI	105%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Hambatan atau Kendala Utama

Keberadaan Perangkat Daerah Badan Riset Dan Inovasi Daerah merupakan jawaban atas beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, efisien, tepat sasaran, dan belum memberikan manfaat yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi sumber rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada, atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru, baik itu yang melalui kajian ataupun penelitian dan dapat langsung diimplementasikan. Dengan adanya Perangkat Daerah ini, juga sangat diharapkan munculnya inovasi-inovasi baru dan dikelola kekayaan Intelektualnya sehingga akan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Bali dan kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah Provinsi Bali berbasis riset dan inovasi, sehingga masyarakat Bali akan semakin mandiri dan sejahtera. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam kelitbangan dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

- 3) Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
- 5) Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi.
- 6) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi

B. Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* dalam dalam penetapan kegiatan berdasarkan kajian/penelitian mendapatkan data hasil penelitian untuk pengembangan inovasi daerah
- 2) Melakukan pendataan produk inovasi serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dilakukan identifikasi dan inventarisasi produk unggulan untuk komersialisasi
- 3) Melakukan pengelolaan pegawai dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan melalui diklat/kursus yang dilakukan oleh badan diklat agar dapat mendukung tugas riset dan inovasi.
- 4) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan produk unggulan daerah menjadi produk industri unggulan serta proses intermediasi dan difusi teknologi untuk membangun suatu proses pemanfaatan hasil-hasil riset agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- 5) Mengembangkan sistem inovasi dengan mendorong faktor-faktor kunci keberhasilan diantaranya keterkaitan (*linkages*), kemitraan (*partnership*), jaringan (*networking*), interaksi serta sinergi positif disertai Mengembangkan kluster inovasi yang merupakan jembatan yang dapat memfasilitasi komunikasi yang intensif dan kerjasama antara lembaga penelitian dan industri yang ada di Bali.

2.4 Kebijakan Renja 2023

Bahwa kebijakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja BaRI T.A 2023 adalah untuk memperkuat dari implementasi RKPD 2023, yakni: “*Penyeimbangan Struktur Dan Fundamental Perekonomian Bali Melalui Ekonomi Kerthi Bali*”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan konsep Transformasi Ekonomi Kerthi Bali guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali guna terwujudnya Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi. Perekonomian Bali saat ini didominasi oleh Sektor Pariwisata (56,78%), Sektor Pertanian (9,24%), Sektor Kelautan/Perikanan(4,21%), Sektor Industri(14.63%), dan Sektor lain (15,14%). Kontribusi sektor di luar pariwisata relatif kecil, bahkan berpotensi terus mengalami penurunan. Perekonomian Bali sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal.

Lebih lanjut, secara eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital sudah sangat dinamis, masif, dan mengglobal merasuk dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu perlu diakomodasi dan diterapkan dalam memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali. Oleh karenanya, guna memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu Ekonomi Kerthi Bali,

Ekonomi Kerthi Bali bertujuan membangun perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam beserta isinya serta memberikan manfaat dan nilai tambah berganda secara langsung dan tidak langsung, baik nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun tatanan kehidupan. Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi acuan/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perekonomian Bali. Serta dapat di adopsi untuk pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional dan internasional. Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi arus utama (*mainstream*) baru pembangunan perekonomian, sebagai paradigma

baru pembangunan perekonomian yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat. Konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini telah dijadikan model transformasi ekonomi berupa Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, dan telah berkenan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 Desember 2021. Dalam sambutan peluncuran, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan tiga hal yang menjadi catatan dalam pembangunan Bali. Pertama, diversifikasi ekonomi, meliputi pariwisata hingga pertanian. Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Ketiga, pariwisata Bali bertransformasi dari *mass tourism* menjadi *green tourism* serta *quality tourism*, mengusung pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan, mewujudkan harmoni dan memuliakan alam.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) BaRI Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penguatan implementasi Tema RKPD Tahun 2023 yakni penyeimbangan struktur dan fundamental Perekonomian Bali pada 6 (enam) sektor utama Ekonomi Kerthi Bali, meliputi penguatan pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, industri, IKM dan UKM serta Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata melalui Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan penyediaan fasilitasi kajian/penelitian bidang prioritas dan penunjang pembangunan Bali yang akan mendukung peta jalan ekonomi Kerthi Bali.

Rancangan awal Renja Tahun 2023 khususnya untuk urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimana terdiri atas 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total 6 (enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp17.402.431.380, atau 54,60% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan serta untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Program Prioritas terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.470.9324.620,- atau sebesar 45,40% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 31.873.366.000,-

Hasil Analisis Kebutuhan terkait dengan Program/Kegiatan Tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merujuk pada Tabel 7.2 B RPJMD-P Semesta Berencana 2018-2023 serta Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah 2018-2023.



Gambar 2.2
Rancangan Struktur Program Anggaran BaRI Tahun 2023

Tabel 2.5
Identasi Kebutuhan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	I. FIXED COST			II. Belanja Penunjang	III. Belanja Prioritas	
		Gaji dan Tunjangan ASN (Rp)	Gaji dan THR Tenaga Kontrak Serta (Rp)	Operasional Rutin (Rp)	(Keseekretariatan) (Rp)	(Prioritas Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah)	
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (BaRI)	11,562,362,474	Tenaga Administrasi : Rp. 899.434.752	Belanja Listrik, Air, Telpon Rp 226.000.000	Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja: Rp 125.831.300	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan Rp 3.586.000.000	Fasilitasi pelaksanaan Riset/ Kajian dalam upaya mendukung implementasi pelaksanaan program Ekonomi Kerthi Bali
			Tenaga Malam: Rp. 112.429.344	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp 466.952.803	Administrasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan: Rp 33.534.350	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rp 1.700.000.000	
			Sopir/Pengemudi: Rp.370.288.032		Sarana dan Prasarana Penunjang, Logistik, Administrasi Pelayanan Umum	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Rp. 925.000.000,00	
			Sopir/Pengemudi: Rp.370.288.032			Pengembangan dan	

					Rp 3.343.263.289	Inovasi Teknologi	
			Cleaning Service: Rp. 149.905.792			Rp 1,395,934,620	
			Tukang Kebun: Rp.112.429.344				
			Honorarium POKLI Pembangunan Rp. 6.864.000.000				
	TOTAL	11,562,362,474	8.508.487.264	692.952.803	3.502.628.839	7.606.934.620	
	TOTAL KEBUTUHAN RANCANGAN AWAL RENJA						31.873.366.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 dimana ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang; Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah **tidak ada usulan Sub Kegiatan baru**, hal ini karena Program/Kegiatan yang telah dirancang sudah bisa menjawab permasalahan yang terjadi, namun pada adanya usulan terkait penyesuain topik riset yang perlu diprioritaskan, antara lain:

No	Nama Usulan Kajian/ Penelitian	Luaran
1	Kajian Carrying Capacity Kepariwisata Bali	Rekomendasi Kajian untuk melaksanakan Mondatorium pengembangan akomodasi (hotel) di Kaasan Bali Selatan khususnya
2	Kajian <i>Digital Nomade Tourism</i>	Meningkatnya potensi pengembangan Pariwisata berbasis digital bagi professional/excpert tourism untuk bekerja dari Bali sehingga dapat meningkatkan PAD,
3	Kajian Efektivitas Pelakssanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Mengetahui Dampak Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah
4	Kajian Literasi Berbasis Kearifan Lokal	Mengetahui potensi kearifan lokal (seperti wayang, dll) sebagai sarana pengembangan Pendidikan bagi generasi muda/millennial

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah T.A 2023

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, yakni:

1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat Sistem Jaminan Sosial, Modernisasi Pertanian serta Pemerataan Pembangunan, dengan indikator yang ingin dicapai :

- a) Diharapkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus mampu menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.
- b) Dalam proses penghapusan kemiskinan ini diharapkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%.
- c) Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan Nilai Tukar Petani/Nelayan 103-105/105-107.

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Hal ini dilaksanakan melalui upaya penguatan sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter), dengan indikator yang ingin dicapai:

- a) Prevalensi **stunting** (pendek dan sangat pendek) pada balita **17,5% menjadi menurun 14% di Tahun 2024.**
- b) Insidensi TB **211** per 100.000 penduduk
- c) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar **71%**
- d) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi **43 %**

- e) Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 **17,48%**
 - f) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas **9,24 tahun.**
 - g) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) **31,89 Persen**
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerja produktif (*decent job*).

Hal ini dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha, dengan indikator yang ingin dicapai adalah:

- a) Peningkatan proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.
 - b) Peningkatan persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.
 - c) Meningkatnya jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sampai 50.000 orang.
 - d) Meningkatnya persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.

Hal ini dilakukan melalui Revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan target pencapaian indikator:

- a) Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
 - b) Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
 - c) Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar
 - d) Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
 - e) Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp.1.279 triliun
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.

Hal ini dilakukan melalui Industrialisasi serta pelaksanaan Riset dan Inovasi, dengan target indikator pencapaian, yakni:

- a) Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar **5,4-5,9 %**
- b) Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Pengolahan sampai dengan **20,6 %**

- c) Meningkatnya Produk Inovasi dan Produk Prioritas Nasional yang mampu dihasilkan
- d) Meningkatnya Peringkat Global Innovation Index **75-80**
- e) Meningkatnya Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas sebesar **5,55-6,08%**
- f) Meningkatnya Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas menjadi sebesar 18,80%

6) Ekonomi hijau.

Mengingat Indonesia akan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim. Upaya mewujudkan Ekonomi rendah karbon dan melakukan Transisi energi wajib dilaksanakan, sehingga kondisi yang diinginkan di Tahun 2023 adalah:

- a) Adanya Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan **27,02 %**
- b) Peningkatan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif sebesar **1.778,2 GW**
- c) Meningkatnya Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan
- d) Meningkatnya Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau

7) Terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Hal ini dilakukan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital serta Infrastruktur Konektivitas, dengan indikator target pencapaian:

- a) Peningkatan volume tampungan air per kapita **54,50m³/det.**
- b) Meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.
- c) Peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak

- d) Terjangkaunya Masyarakat menggunakan Internet. Dimana diharapkan Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif mencapai **50%**

3.2 Telahaan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah T.A 2023

Visi yang telah ditetapkan Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, yaitu :**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU** Yang **mengandung makna** “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi **Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.**”Menuju Bali Era Baru.

Sedangkan, dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar daripada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke 22, yaitu: **Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.** Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Dalam Rancangan Awal RKPD 2023 (Bappeda Prov Bali, 2022) dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi

kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

Bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.

6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.



Gambar 3.1
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 2 (dua) menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal *emergency* komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan karma Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan karma Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM.



Gambar 3.2
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitasilasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.



Gambar 3.3
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karna Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.
5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5)

- festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).
6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.



Gambar 3.4
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Pada Bidang prioritas 5 (lima), diarahkan Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai *genuine* Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2)

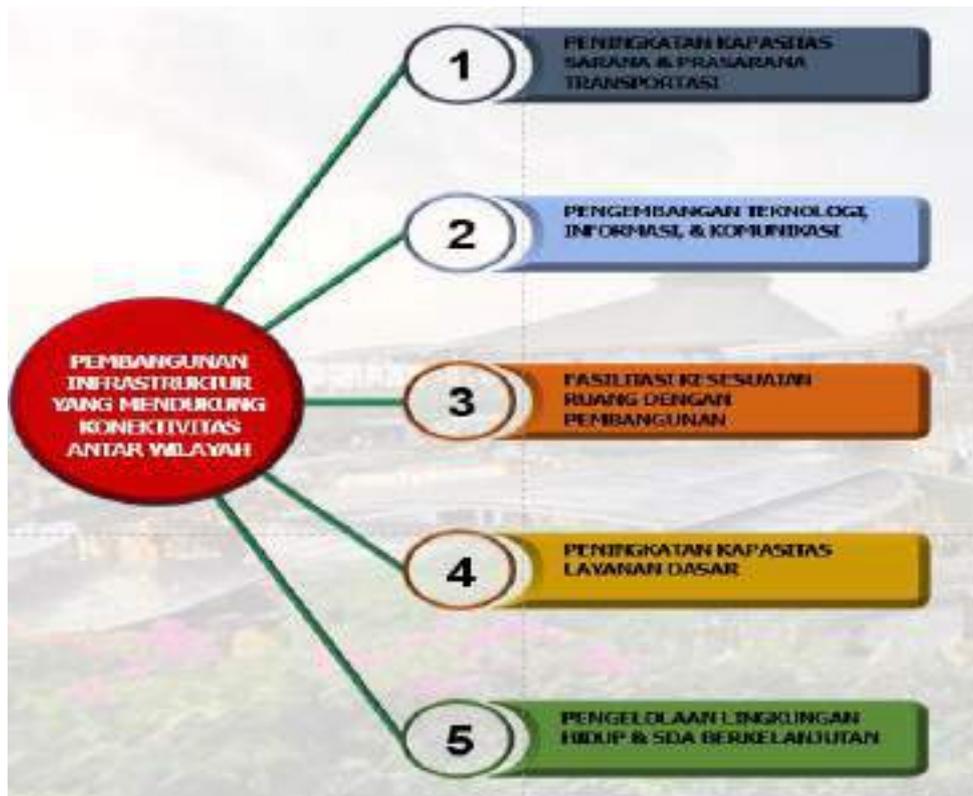
- Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data (MICT) dan statistik kepariwisataan.
 3. Pengembangan standar industri pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (passanger fee).
 4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
 5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.



Gambar 3.5
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Sedangkan berdasarkan Bidang Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industri yang akan mendukung konektivitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistic daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.



Gambar 3.6
 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas
 Pembangunan Infrastruktur
 Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Prioritas 7 (tujuh) adalah tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.

3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen (NJKB).
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.



Gambar 3.7

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Program prioritas urusan penelitian dan pengembangan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD akan dicapai selama 5 tahun mendatang, menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sebagai instansi dengan tugas pokok dan fungsi ***penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali di bidang penelitian dan pengembangan.***

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri.

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Sebagai indikator produktivitas Riset, akan diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan kemampuan menciptakan inovasi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi dapat meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara

kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui pelaksanaan riset dan inovasi daerah.



Gambar 3.8
Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BaRI Provinsi Bali
Sumber : Rancangan Akhir Perubahan Renstra BaRI 2018-2023

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU maupun IKK pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	14% 7/50	14% 7/50
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	70% 7/8	70% 7/8

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2023 khususnya untuk program /kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali terdiri atas 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. 1 (satu) Program dengan 6 (enam) kegiatan merupakan program pendukung pelaksanaan tupoksi yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp. 15.882.259.438 Sementara itu untuk Program Prioritas terdiri dari 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan total anggaran sebesar Rp. 9.750.000.000. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan total anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang social dan Kependudukan sebesar Rp.925.000.000, dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi total anggaran sebesar Rp.1.145.934.620, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Perumusan rencana program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan prioritas program dan kegiatan OPD menurut Rancangan Akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi.

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan pada tahun anggaran 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Tabel 4.1 sebagai berikut TABEL 4.1

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Uraian	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja 2024		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Tolak Ukur		Target		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.831.300			138.414.430		
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	65.192.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	71.712.190
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Laporan	60.638.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	66.702.240

5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.595.896.824				12.755.486.506
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		60 orang/bulan	11.562.362.474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	12.718.598.721
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		600 Dokumen	15.573.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	17.131.235
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5 Dokumen	10.628.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok	11.691.240
5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	7.332.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	8.065.310
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				690.572.900				759.630.190

5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		10 Paket	22.524.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	24.776.400
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		28 Paket	54.752.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	60.228.190
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		8 Paket	157.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	173.250.000
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Paket	25.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.698.000
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		4 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	4 Dokumen	16.500.000

													Disediakan			
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	415.616.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	457.177.600
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					952.920.000				1.048.212.000
5	05	01	1.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		3 Paket	233.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	257.180.000
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		4 Unit	719.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	791.032.000

5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.496.036				608.845.640
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	3.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.828.000
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	226.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248.600.000
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	324.016.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	356.417.640
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.483.714.320				3.832.085.752

5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		10 Unit	837.240.835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	920.964.919	
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5 Unit	2.646.473.485	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.911.120.834	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								14.470.934.620				15.918.028.082
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					9.750.000.000					10.725.000.000
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Persentase Hasil Kelitbangannya Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua		6 Laporan	7.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan	6 Laporan	8.250.000.000	

5	05	02	1.01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	330.000.000
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua		2 Laporan	850.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	2 Laporan	935.000.000

									Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentas e Hasil Kelitbanga n Yang Diimpleme ntasikan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.	7 Dokumen	650.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Data Kelitbanga n dan Peraturan yang Dikelola	7 Dokumen	715.000.000

								Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomenda si Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaa n Peraturan	Persentas e Hasil Kelitbanga n Yang Diimpleme ntasikan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan,	5 Rekomendasi	450.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomen dasi atas Rencana Penetapa n Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksana an Peraturan yang diterbitkan	5 Rekomend asi	495.000.000	

									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				2.400.000.000				2.640.000.000
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	275.000.000
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	495.000.000

5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	385.000.000
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	325.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	357.500.000
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	700.000.000	Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	770.000.000
5	05	02	1.03	10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	325.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	357.500.000

5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			1.175.000.000				1.292.500.000	
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	247.500.000
5	05	02	1.02	05	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	385.000.000
5	05	02	1.02	06	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	660.000.000
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.145.934.620				1.260.528.082

5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	327.632.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	360.395.728
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	360.302.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	396.332.354
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh		1 Laporan	458.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Laporan	503.800.000

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 menuju Bali Era Baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak utamanya stakeholders terkait, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terikat akan dokumen perencanaan ini.

Optimalisasi pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta pencapaian target pada akhir periode RPJMD 2018 – 2023.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, bersama seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja induk tahun 2021.
- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- c. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
- d. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3 Tindak Lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 yang akan dimanfaatkan oleh jajaran di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sendiri maupun stakeholder terkait yang berkepentingan. Rancangan Awal Renja akan dipedomani sebagai alat kendali mulai dari proses perencanaan awal sampai dengan perencanaan akhir Rencana Kerja Tahun 2023.

KEPALA BADAN



I MADE GUNAJA

NIP. 19640620 199003 1 012



ບົຍກິຊຸງຖູບາບິຊຸງິ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕາຂາລິກິລິເອາລິ ບິກຸສາບລິ ຂາດກຸ
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
ຕາຂາລິກິລິເອາລິ ບິກຸສາບລິ ຂາດກຸ (ບາບິຊຸງິ)
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
ຖາກຸກຸລາລິ (ບາບິຊຸງິ) ບາບິຊຸງິ
TELEPON: (0361) 228365
EMAIL: bari@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://bari.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

TENTANG
NOMOR 1182 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan Renja Perangkat Daerah perlu mempersiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 43);

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah disetujui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali untuk diverifikasi;
 - melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melalui Sekretaris .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN,


I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

TANGGAL NOMOR 1182 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- Sekretaris : Sub Koordinator Substansi Penyusunan Program,
Evaluasi dan Pelaporan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian
Peraturan
2. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan
Daerah
3. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan
Daerah
4. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan
Pengelolaan Kekayaan Intelektual
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Sub Koordinator Substansi Keuangan
7. Sub Koordinator Unit Substansi
Pemerintahan
8. Sub Koordinator Unit Substansi
Pemerintahan Desa
9. Sub Koordinator Unit Substansi Data dan
Pengkajian Peraturan
10. Sub Koordinator Unit Substansi Pangan,
Sandang, dan Papan
11. Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan,
Kesehatan, Jaminan Sosial, dan
Ketenagakerjaan
12. Sub Koordinator Unit Substansi Adat,
Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan
Pariwisata
13. Sub Koordinator Unit Substansi
Infrastruktur
14. Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi
15. Sub Koordinator Unit Substansi Keamanan
16. Sub Koordinator Unit Substansi Pendaftaran
dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual.

17. Sub Koordinator Unit Substansi Intermediasi, Difusi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual
18. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Teknologi dan Inovasi
19. Fungsional Perencana Ahli Pertama (Ida Ayu Suartini, SE)

KEPALA BADAN,



I MADE GUNAJA

NIP. 19640620 199003 1 012

LAMPIRAN 1

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

A. Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali

B. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
11. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
22. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
23. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
24. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
25. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
29. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
30. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
31. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
32. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
33. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN 2

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

LINGKUP BAHAN PAPARAN RANCANGAN AWAL RENJA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan penyelenggaraan Pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah (sesuai bidang Urusan) Tahun 2023. Referensi permasalahan per urusan dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diunduh pada alamat <https://bit.ly/PermasalahanRKPD22>
2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021 serta usulan target dan pendanaan pada tahun 2023.

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan agar konsisten untuk menjawab indikator tabel 7.2.B Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah serta harus memperhatikan pencapaian target akhir kinerja RPJMD dan Renstra untuk menjamin penuntasan pencapaian kinerja sampai akhir periode RPJMD dan Renstra.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2022	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2023	Kebutuhan Dana Tahun 2023	Lokasi
1	Program ... Kegiatan ... Sub Kegiatan:....

Catatan :

Sebelum penentuan jumlah kebutuhan dana dalam pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan, masing-masing Perangkat Daerah harus mampu menjelaskan "Sisa Target Kinerja yang belum tertangani" sehingga Prioritas Pendanaan akan lebih terarah dalam menjamin pemenuhan target kinerja sampai dengan akhir Tahun RPJMD dan Renstra.

3. Skala prioritas anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kedalam 3 Kriteria yaitu:
 - a. *Fixed Cost* yaitu Anggaran Wajib Perangkat Daerah untuk anggaran Gaji dan Tunjangan PNS serta Gaji Tenaga Kontrak, operasional rutin dan wajib seperti listrik, air telpon, dan pemeliharaan kendaraan dinas
 - b. Belanja Penunjang (Anggaran untuk rehab Gedung, pengadaan Komputer/Laptop)
 - c. Belanja Prioritas (Anggaran untuk mendukung program unggulan perangkat daerah diluar tenaga kontrak)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1							

Pemetaan anggaran dipergunakan sebagai bahan referensi dalam penentuan urgensi pendanaan apabila nantinya akan terdapat rasionalisasi pagu anggaran. Prioritas pemotongan anggaran dimulai dari belanja penunjang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN 3

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

MEKANISME *BILATERAL MEETING*

Bilateral meeting dilakukan dengan pola *desk* dialog interaktif, dimana peserta akan dibagi per kelompok yang terdiri dari unsur :

1. Penyaji :

- a. Perangkat Daerah, sesuai pembagian jadwal

2. Pembahas :

Koordinator :

- a. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali
- b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali
- d. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali

Teknis :

- a. Para Sub Koordinator Unit Substansi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali
- b. Para Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali
- c. Para Sub Koordinator Unit Substansi Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali
- d. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

3. Materi yang dibahas pada desk :

- a. Ketajaman rumusan Permasalahan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- b. Ketajaman data Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan yang akan diusulkan pada tahun 2023.
(Semakin jelas dan semakin terukur Perangkat Daerah dalam menyajikan data evaluasi dan target, maka akan mendapat prioritas pendanaan).

Membahas keselarasan pencapaian indikator Perangkat Daerah dengan merujuk pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 memperhatikan aspek tematik, holistik (menyeluruh), Integrasi (terpadu) dan spasial untuk memperjelas arah lokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, sehingga mempermudah sinergitas penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diKabupaten/Kota se-Bali dan memperjelas keselarasan arah usulan pendanaan Kabupaten/Kota se-Bali ke Provinsi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. Penentuan skala prioritas anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kedalam 3 Kriteria yaitu:
 - a. *Fixed Cost* yaitu Anggaran Wajib Perangkat Daerah untuk anggaran Gaji dan Tunjangan PNS serta Gaji Tenaga Kontrak, operasional rutin dan wajib seperti listrik, air telpon, dan pemeliharaan kendaraan dinas
 - b. Belanja Penunjang (Anggaran untuk rehab Gedung, pengadaan Komputer/Laptop)
 - c. Belanja Prioritas (Anggaran untuk mendukung program unggulan perangkat daerah diluar tenaga kontrak)

Pemetaan anggaran dipergunakan sebagai bahan referensi dalam penentuan urgensi pendanaan apabila nantinya akan terdapat rasionalisasi pagu anggaran. Prioritas pemotongan anggaran dimulai dari belanja penunjang.



LAMPIRAN 4

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

OUTPUT PELAKSANAAN *BILATERAL MEETING*

1. Tersusunnya Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, untuk mendukung Bab II RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
2. Tersusunnya Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan serta lokasi yang akan diusulkan pada tahun 2023 yang mengacu pada penuntasan target akhir tahun Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Tabel 7.2).
3. Tersusunnya Skala Prioritas Pendanaan pada masing-masing Perangkat Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN 5

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

OUTPUT DITUANGKAN KEDALAM FORMAT BERITA ACARA SEBAGAI BERIKUT:

(Berita Acara dibuat per masing-masing Perangkat Daerah)

BERITA ACARA KESEPAKATAN *BILATERAL MEETING*

Nomor:...../...../BPPE/Bappeda

Pada hari tanggal bulan Pebruari tahun 2022, telah diselenggarakan *Bilateral Meeting* antara Perangkat Daerah..... dengan Jajaran Bappeda Provinsi Bali yang dilaksanakan secara virtual. Setelah memperhatikan penyajian materi dari Perangkat Daerah..... dan pembahasan yang ada, maka disepakati :

KESATU : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pada Perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023, adalah :

- a.
- b. dst

KEDUA : Rumusan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2022	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2023	Kebutuhan Dana Tahun 2023	Lokasi
1	Program ... Kegiatan Sub Kegiatan:....

KETIGA : Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (<i>Fixed Cost</i>)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1							

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

Penyaji,

Pembahas,

(Pejabat Perangkat Daerah)
Pangkat
NIP.

(Pejabat Bappeda Provinsi Bali)
Pangkat
NIP.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN 6

Surat Nomor: B.11.005/378/BPPE/Bappeda

Tanggal 2 Pebruari 2022

JADWAL BILATERAL MEETING TAHUN 2022

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
Hari/Tanggal : Senin, 7 Pebruari 2022			
1	08:00 - 08:30 Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd	Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Bali	Seluruh Kelompok Ahli Pembangunan, Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda serta seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali
2	08:30 - 09:00	PERSIAPAN PESERTA JOIN PADA MASING-MASING MEETING ID	
3	09:00 - 12:00 Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Pekerjaan Umum: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Pekerjaan Umum 6. Ir. I Made Sudiarsa, M.Si. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	09:00 - 12:00 Meeting ID: 928 2336 8030 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Bidang Ekonomi: 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1. I Ketut Jaman, SS., M.Si. 2. Cipto Aji Gunawan 3. Sugeng Pramono, SE., S.Par 4. Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc. 5. Drs. I Ketut Sumarta 6. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si. 7. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA. 8. Dr. Gusti Kade Sutawa, SE., MM. 9. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA. 10. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T. 11. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 12. Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi 13. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 14. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

Balai
Sertifikasi
ElektronikDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
5	09:00 - 12:00 Meeting ID: 921 1282 7288 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Kesejahteraan Sosial: 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Kebudayaan	1. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum 2. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, ST., MA. 3. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn. 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Sub Koordinator Unit Substansi Kesejahteraan Sosial 6. Titik Rusmiyati, S.Sos. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
6	12:00 - 12:30	ISTIRAHAT	
7	12:30 - 14:00 Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi: 1. Dinas Perhubungan	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Kepala Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi 6. Ir. I Made Sudiarsa, M.Si. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
8	14:15 - 15:30 Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi: 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom. 2. I Putu Putra Jaya Wardana, SE., MT. 3. I Wayan Juniarta 4. Drs. I Made Nariana 5. I Dewa Made Krishna Muku, ST., MT. 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 7. Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi 8. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
9	12:30 - 15:30 Meeting ID: 928 2336 8030 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi SDA: 1. Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Prof Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. 2. Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, MS. 3. Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si. 4. Prof.Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D. 5. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 6. Sub Koordinator Unit Substansi SDA 7. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
10	12:30 - 15:30 Meeting ID: 921 1282 7288 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pembangunan Manusia: 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. 2. Ir. Tjokorda Bagus Oka Ph.D. 3. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, MEngSc., PhD. 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Sub Koordinator Unit Substansi Pembangunan Manusia 6. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Pebruari 2022			
1	09:00 - 12:00 Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah: 1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 2. Ir. Made Arca Eriawan, MM 3. I Gede Sudiarta, S.Sos., M.Si. 4. Prof. Ir. Made Sudiana Mahendra, MappSc., PhD,C.IEA. 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Sub Koordinator Unit Substansi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah 7. Titik Rusmiyati, S.Sos. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
2	09:00 - 12:00 Meeting ID: 928 2336 8030 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Keuangan dan Investasi: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pendapatan Daerah	1. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA. 2. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T. 3. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 4. Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan dan Investasi 5. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP., M.AP. 6. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
3	09:00 - 12:00 Meeting ID: 921 1282 7288 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pemerintahan: 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Biro Umum dan Protokol 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 4. Biro Hukum 5. Biro Organisasi 6. Sekretariat DPRD	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana 3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. I Dewa Nyoman Rai, SH. 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10. Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan 11. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 12. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	12:00 - 12:30	ISHOMA	
5	12:30 - 15:30 Meeting ID: 921 1282 7288 Password: rkpd	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pemerintahan: 1. Badan Penghubung 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana 3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. I Dewa Nyoman Rai, SH. 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10. Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan 11. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 12. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE